

INTERAKSI PARTISIPATIF ANTARA PENYULUH PERTANIAN DAN KELOMPOK TANI MENUJU KEMANDIRIAN PETANI

Participatory Interaction between Agriculture Extension Workers and Farmers' Groups toward Farmers Self-Reliance

Joni Jafri¹, Rudi Febriamansyah², Rahmat Syahni³, dan Asmawi⁴

¹ Balaj Pelatihan Pertanian Jambi, Jl. Jambi Palembang, Km 16 Pondok Meja, Muaro Jambi 360011

^{2,3} Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
E-mail: jonijafri@gmail.com

Naskah diterima: 16 Juli 2015

Naskah direvisi: 24 Agustus 2015

Disetujui terbit: 25 September 2015

ABSTRACT

Most of the farmers are smallholders and they are economically weak and lack of capacity building. According to BPS, in 2013 the smallholders, i.e., who hold land area less than 0.5 hectare, are 14,25 million households or 55,3 percent of 26 million farmers' households. It is necessary to develop the agricultural human resource. Objective of this research was to analyze the factors affecting capacities of agricultural extension workers (PPL) and farmers group in developing participatory social interaction between both parties. The research was conducted in Merangin and Kerinci Regencies, Jambi Province. There were 180 samples consisting of 36 persons of PPL and 144 farmers. The qualitative data was analyzed using a descriptive-inductive approach and the next was a quantitative analysis using a PLS programme (Partial Least Square). The results showed that the participatory interaction was determined by PPL's capacity and farmers group's capacity. Farmers group's capacity influence was higher than that of PPL. Low PPL's capacity leads to lack of participatory agricultural extension achievement.

Keywords: *extension, agriculture, interaction, farmers group, Jambi*

ABSTRAK

Sebagian besar petani adalah petani berskala kecil, dengan kemampuan yang relatif lemah secara ekonomis, dan lemah dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Menurut BPS tahun 2013 jumlah petani gurem (rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari setengah hektar) adalah sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sekitar 55,33% dari sekitar 26 juta rumah tangga pertanian. Rendahnya kapasitas petani secara keseluruhan semakin membutuhkan perhatian serius terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani dalam membangun interaksi sosial yang bersifat partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani. Penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan total sampel sebanyak 180 orang, terdiri dari 36 orang penyuluh pertanian dan 144 orang petani. Data kualitatif yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-induktif, sementara data yang bersifat kuantitatif selanjutnya dianalisis menggunakan program *partial least square (PLS)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani secara nyata ditentukan oleh kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani. Kapasitas kelompok tani memberikan pengaruh lebih nyata terhadap interaksi partisipatif dibandingkan dengan kapasitas penyuluh pertanian. Rendahnya kapasitas penyuluh pertanian mengarah pada rendahnya pencapaian penyuluhan pertanian yang partisipatif.

Kata kunci: *penyuluhan, pertanian, interaksi, kelompok tani, Jambi*

PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian (PP) memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian, mengingat keterbatasan yang masih dimiliki SDM pertanian, dalam mendorong terwujudnya kemandirian petani. Sumardjo (1999, 2010) menjelaskan bahwa membangun petani sebagai pelaku utama pertanian yang handal berarti membangun kemandirian petani. Berdasar pada hasil penelitian Pambudy (1999), Padmanegara (2004), dan Sumardjo (2010), bahwa PP telah kehilangan makna karena keberhasilannya hanya diukur dengan peningkatan produksi, sementara pengembangan karakteristik dan kapasitas petani justru terpinggirkan dan terabaikan. Kondisi tersebut muncul karena kegagalan membangun interaksi yang partisipatif, dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada penyuluh dan petani untuk menjalin kebersamaan dalam mendorong kemampuan memecahkan masalah.

Dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K), maka PP didorong untuk lebih partisipatif, dengan menggeser pendekatan yang lebih digerakkan oleh penerima (*demand driven*). Dengan demikian, kebutuhan dan masalah petani menjadi titik sentral sebagai dasar penyelenggaraan PP. Interaksi yang tidak partisipatif menyebabkan petani jadi kehilangan prakarsa, inisiatif, bahkan kehilangan jati diri karena kurang menyentuh pada kapital manusia (*human capital*).

Perdebatan selama ini memperlihatkan bahwa wacana untuk terjadinya interaksi sosial yang bersifat partisipatif antara penyuluh pertanian dan petani berdasar pada substansi UU SP3K tersebut masih belum berjalan secara baik. Secara hipotetis, kondisi interaksi sosial yang partisipatif hanya akan berjalan dengan baik pada saat ada faktor lingkungan yang mendukung (*enabling-environment*) bagi penyuluh pertanian, yaitu berupa ruang birokrasi yang memberikan kesempatan dan memfasilitasi terwujudnya karakter penyuluh pertanian yang partisipatif, inovatif, dan kreatif. Walgito (2003) dan Ahmadi (2002) menekankan bahwa faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati tidak akan terjadi dengan baik di dalam interaksi sosial yang lebih didominasi oleh satu pihak saja.

Secara teoritis, suatu interaksi sosial yang dapat mengakselerasi dinamika faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati antara dua belah pihak yang berinteraksi akan sangat bermanfaat untuk memunculkan rasa saling ketergantungan, saling pengertian, yang akhirnya akan menjadi kekuatan untuk mendorong kemandirian pada pihak kelompok tani sasaran. Kegagalan memaknai betapa pentingnya interaksi sosial antara kedua pihak ini akan memperlambat terwujudnya perubahan perilaku, sebagai upaya mendorong kemandirian. Permasalahan pokok yang ingin dijawab secara mendalam adalah seberapa kuat faktor internal ataupun eksternal dari penyuluh pertanian dan kelompok tani berperan dalam menentukan terbangunnya interaksi partisipatif antara keduanya dalam upaya membangkitkan kemandirian petani/kelompok tani. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani dalam membangun interaksi yang partisipatif menuju terbangunnya kemandirian petani/kelompok tani.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksplanatori yang menelaah hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis variabel-variabel yang telah dirumuskan. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani yang berpengaruh terhadap interaksi partisipatif antara keduanya.

Menurut CIDA (2001) kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pengertian, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan/sector, dan sistem sosial yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan pembangunan setiap saat. Kapasitas penyuluh pertanian ditelaah dari faktor internal dan faktor eksternal melalui beberapa variabel. Faktor Internal penyuluh pertanian dicirikan oleh (a) karakteristik pribadi penyuluh pertanian (KS), (b) kompetensi komunikasi (KKS), (c) kompetensi andragogik (KA), (d) kompetensi mengembangkan kelompok (KMS), dan (e) kompetensi sosial (KSS). Faktor eksternal penyuluh pertanian

dipengaruhi oleh (a) kebijakan penyuluhan (KPS), (b) struktur organisasi (SOS), (c) dukungan inovasi (DIS), dan (d) sarana prasarana (SRS).

Kapasitas kelompok tani ditelaah dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal kelompok tani dicirikan oleh (a) karakteristik pribadi petani (KT), (b) struktur kelompok (SK), (c) kekompakan/kebersamaan (KK), dan (d) efektivitas kelompok (EK). Faktor eksternal kelompok tani dipengaruhi oleh (a) sistem pembinaan (SP), (b) sosial budaya (SB), dan (c) sarana prasarana (SPR).

Menurut Turner (1988), Ahmadi (2002), Walgito (2003), dan STIK (2010), interaksi merupakan suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu memberikan efek (memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki) kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Interaksi partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani ditelaah dari rangkaian informasi tentang (a) proses motivasi penyuluh pertanian (PMS), (b) proses interaksi penyuluh pertanian (PIS), (c) proses strukturisasi penyuluh pertanian (PSS), (d) proses motivasi kelompok tani (PM), (e) proses interaksi kelompok tani (PI), dan (f) proses strukturisasi kelompok tani (PS).

Dalam penelitian ini yang menjadi topik kajian adalah peran faktor internal dan eksternal dari penyuluh pertanian dan

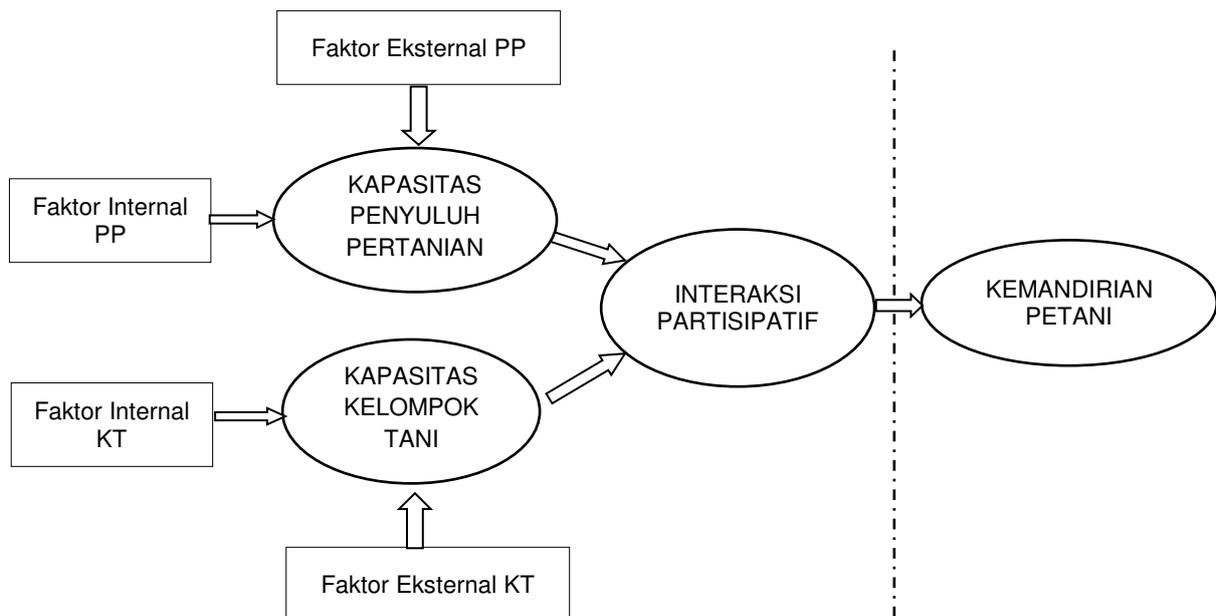
kelompok tani dalam memengaruhi kapasitas keduanya dalam menciptakan interaksi partisipatif antara penyuluh pertanian dengan kelompok tani. Interaksi partisipatif diharapkan akan mengakselerasi kemandirian petani. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini disajikan seperti Gambar 1.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama kurang lebih sembilan bulan antara bulan Februari hingga Oktober 2012 dan dilanjutkan bulan Februari hingga Maret 2013.

Metode Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel penyuluh dan kelompok tani dilakukan dengan cara acak bertingkat (*multistage random sampling*). Pada setiap kabupaten dipilih sebanyak enam kecamatan/BP3K dan pada setiap kecamatan/BP3K dipilih sebanyak tiga desa. Pemilihan sampel penyuluh adalah satu orang penyuluh lapangan sesuai desa terpilih, dan pemilihan kelompok tani secara acak sebanyak dua kelompok tani pada setiap desa terpilih. Sumber informasi dari setiap kelompok tani adalah satu orang



Gambar 1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan interaksi partisipatif dalam menuju kemandirian petani

pengurus dan satu orang anggota kelompok tani. Dengan demikian, jumlah sampel penyuluh sebanyak 36 orang, dan sampel petani sebanyak 144 orang, sehingga total sampel berjumlah 180 orang.

Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur pada sejumlah responden atau sampel dan juga pengumpulan data kualitatif dari informan kunci. Adapun teknik dalam pengumpulan data gabungan yang dilaksanakan adalah: (a) wawancara terstruktur (*structured interview*), (b) metode pengamatan berperan serta (*participatory observation method*), (c) metode dokumentasi data sekunder. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

Metode Analisis

Untuk pengujian hubungan antarvariabel yang diteliti dengan pendekatan statistik non-parametrik, sehingga analisis yang dilakukan mengarah kepada *significance*, arah, dan perbandingan (besar kecil). Seluruh data yang sudah dikonversi sesuai kebutuhan dianalisis dengan menggunakan program *partial least square* (PLS). Menurut Ghozali (2011), metode PLS termasuk dalam kelompok *structural equation modeling* (SEM). Hanya saja, apabila dalam SEM model persamaannya berbasis *covariance*, maka model persamaan PLS berbasis *variance*. *Covariance* berarti *variance* atau keragaman antara dua variabel (x, y), sedangkan *variance* artinya keragaman atau *variance* dalam variabel (x, x). Dengan menggunakan PLS orientasi analisis bergeser dari menguji model kausalistik teori ke *component based predictive model* yang bersifat lebih prediktif dan mengkonfirmasi model/teori. Berbeda halnya dengan model regresi yang mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel, Ghozali (2011) menjelaskan bahwa model PLS merupakan metode analisis yang "*powerful*" karena tidak didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal *multivariate*; indikator dapat bersifat ordinal, interval, sampai ratio, dan sampel tidak harus besar.

Menurut Hidayat *et al.* (2012), langkah-langkah penggunaan PLS adalah sebagai berikut: (1) estimasi parameter SEM-PLS: diperoleh melalui proses iterasi tiga tahap dengan menggunakan *ordinary least square* (OLS); (2) langkah-langkah analisis model *fit* persamaan struktural dengan SEM-PLS.

Outer model untuk indikator refleksif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk blok indikator. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score*. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika korelasinya (nilai loadingnya) lebih dari 0,70 dan cukup jika korelasinya antara 0,50 sampai 0,60. *Discriminant validity* dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya.

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antarkonstruk dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. *Composite reliability* blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *Crobanch's Alpha*, di mana nilai *composite reliability* harus di atas 0,60.

Outer model untuk indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada *substantive content*-nya, yaitu dengan membandingkan besarnya relatif *weight* dan melihat signifikansi dari ukuran *weight* tersebut. Indikator formatif (faktor eksternal penyuluh pertanian dan faktor eksternal kelompok tani) dievaluasi dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada $\alpha = 10\%$ uji satu arah sebesar 1,29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendugaan Model Hubungan Antarvariabel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu indikator dari internal penyuluh, yaitu karakteristik penyuluh/KS memiliki nilai *loading* di bawah 0,5 (0,069), sedangkan indikator lainnya memiliki nilai *loading* di atas 0,5. Pada faktor internal kelompok tani (poktan) didapatkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *loading* di atas 0,5. Pada interaksi partisipatif, tiga indikator memiliki nilai *loading* di bawah 0,5, yaitu proses interaksi

penyuluh/PIS (0,127), proses motivasi penyuluh/PMS (0,065), dan proses strukturisasi penyuluh/PSS (0,018), sedangkan indikator lainnya memiliki nilai *loading* di atas 0,5.

Hubungan antarkonstruk menunjukkan bahwa terdapat satu hubungan yang tidak signifikan, yaitu antara KPP dengan interaksi partisipatif. Hal ini karena nilai t-statistiknya (0,152) lebih kecil dibandingkan t-tabel pada $\alpha = 10\%$ (uji dua arah), yaitu sebesar 1,29. Nilai yang lain lebih besar dari t-tabel. Pada konstruk yang memiliki hubungan signifikan, terlihat semua koefisien bernilai positif, yang berarti semua konstruk memiliki pengaruh positif.

Seluruh faktor eksternal penyuluh pertanian signifikan memengaruhi kapasitas penyuluh, yaitu dukungan inovasi, kebijakan penyuluhan, struktur organisasi, dan sarana prasarana. Selanjutnya, untuk indikator formatif dari faktor eksternal poktan, seluruh indikatornya juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, yaitu sosial budaya, sistem pembinaan, serta sarana dan prasarana.

Inner model atau model struktural awal ini selanjutnya dievaluasi dengan melihat prosentase *variance* yang dapat dijelaskan, yaitu dengan melihat nilai R^2 sebagai uji *goodness of fit* model. Nilai R^2 dari model awal konstruk interaksi partisipatif diperoleh sebesar 0,351, artinya model awal ini masih pada kategori moderat. Sebagai catatan, apabila hasil perhitungan nilai R^2 antara 0,67-1,00 menunjukkan bahwa model baik; antara 0,33-0,66 model dikategorikan moderat; dan antara 0,19-0,32 model dikategorikan lemah sebagai prediktor. Ini menunjukkan bahwa variabilitas interaksi partisipatif yang dapat dijelaskan oleh variabilitas kapasitas kelompok tani (KKT) dan kapasitas penyuluh pertanian (KPP) hanya sebesar 35,07%, sedangkan sisanya sebesar 64,93% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Pada konstruk kapasitas kelompok tani (KKT) diperoleh nilai R^2 sebesar 0,9997 (kategori baik), yang memberikan arti bahwa variabilitas KKT yang dapat dijelaskan oleh variabilitas internal T dan eksternal T sebesar 99,97%, sedangkan 0,03% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. Sementara, pada konstruk kapasitas penyuluh pertanian (KPP) diperoleh nilai R^2 sebesar 0,9987 (kategori baik), yang memberikan arti bahwa variabilitas KPP yang dapat dijelaskan oleh variabilitas internal dan eksternalnya sebesar 99,87%, sedangkan 0,13% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Modifikasi model dilakukan dengan membuang sejumlah variabel yang tidak valid atau tidak berpengaruh nyata, yaitu karakteristik pribadi penyuluh pertanian (KS), proses motivasi penyuluh (PMS), proses interaksi penyuluh (PIS), proses strukturisasi penyuluh (PSS). Hasil modifikasi model disajikan pada Gambar 2. Setelah diuji dengan validitas konvergen, validitas diskriminatif, dan reliabilitas terbukti bahwa pada model modifikasi seluruh variabel laten memiliki *discriminant validity* yang baik, dan reliabilitas instrumen terpenuhi. Validitas konvergen mengacu pada keberadaan korelasi antara instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama, sedangkan validitas diskriminan mengacu pada tidak adanya korelasi antara instrumen dengan konstruk yang tidak diukurinya.

Pengujian model selanjutnya adalah pengujian *R-square* untuk konstruk dependen, yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *T-values* setiap *path*. Pengujian terhadap model struktural berdasar nilai R^2 yang merupakan uji *goodness of fit* model menunjukkan bahwa R^2 untuk konstruk interaksi sebesar 0,3475 atau masih berada pada kategori moderat. Ini menunjukkan bahwa variabilitas interaksi antara penyuluh dan poktan yang baru dapat dijelaskan oleh variabilitas kapasitas kelompok tani dan kapasitas penyuluh pertanian sebesar 34,75%, sedangkan 65,25% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Dengan hasil penelitian yang ada dapat dilihat pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kapasitas penyuluh pertanian, pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kapasitas kelompok tani, serta pengaruh kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani terhadap interaksi partisipatif.

Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kapasitas Penyuluh Pertanian

Faktor Internal Penyuluh Pertanian (IS)

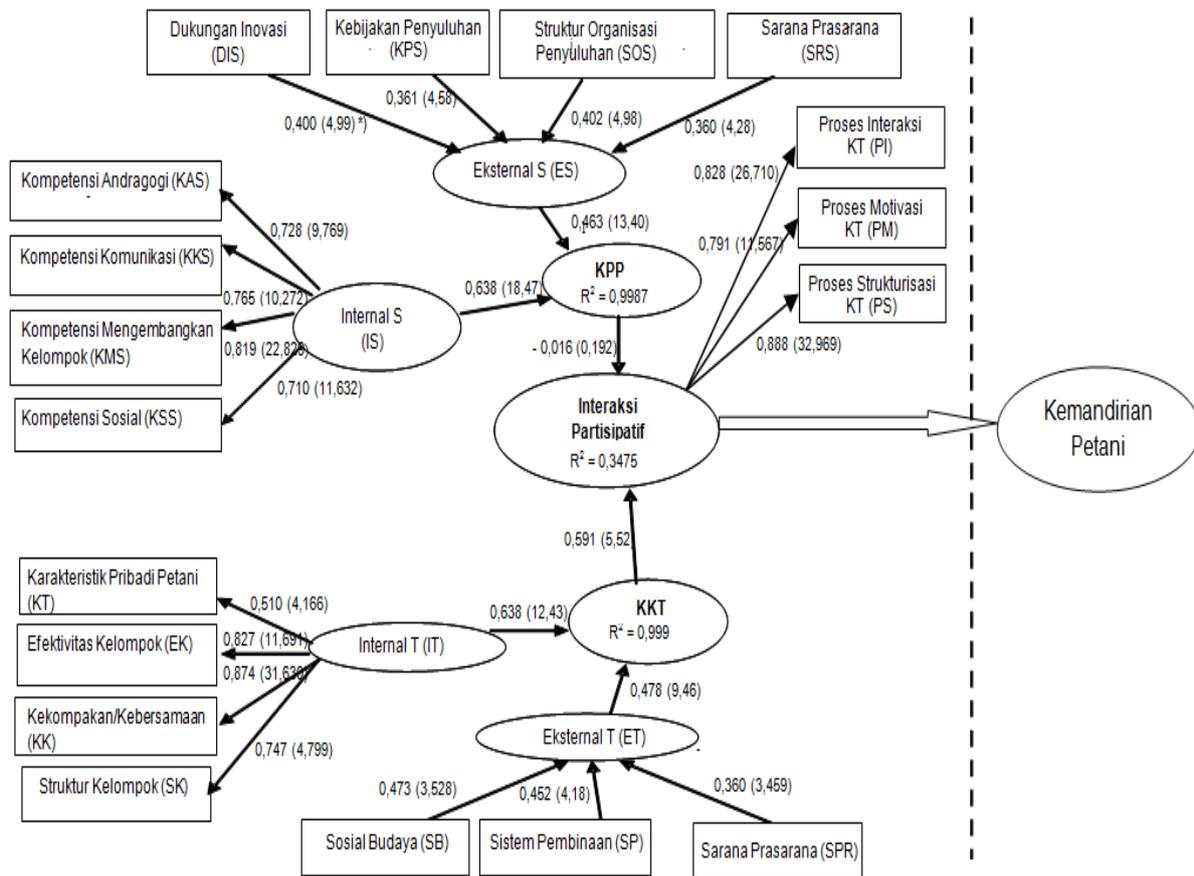
Dari hasil perhitungan dapat digambarkan *outer model* variabel internal S (IS), yaitu:

$$KAS = 0,728 IS + \delta_{10}$$

$$KKS = 0,765 IS + \delta_2$$

$$KMS = 0,819 IS + \delta_3$$

$$KSS = 0,710 IS + \delta_4$$



Keterangan: *) () nilai t hitung

Gambar 2. Faktor loading, path coefficient, dan nilai t-statistik dari modifikasi model

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengaruh faktor internal penyuluh pertanian terhadap kapasitas penyuluh pertanian berpengaruh nyata karena nilai t-statistiknya adalah 18,47 (lebih besar dibandingkan t-tabel pada $\alpha = 10\%$ (uji dua arah) yang sebesar 1,29. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kapasitas penyuluh pertanian dicerminkan oleh kompetensi mengembangkan kelompok, kompetensi komunikasi, kompetensi andragogik, dan kompetensi sosial penyuluh pertanian.

Dari indikator reflektif dari internal penyuluh pertanian yang signifikan adalah KAS dengan nilai loading 0,728, KKS dengan nilai loading 0,765, KMS dengan nilai loading 0,819, dan KSS dengan nilai loading 0,710. Dari faktor internal, kompetensi yang paling kuat mencirikan interaksi partisipatif adalah kompetensi mengembangkan kelompok, diikuti

kompetensi komunikasi, kompetensi andragogik, dan yang paling lemah kompetensi sosial. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penyuluh sangat setuju akan pentingnya kompetensi tersebut, namun belum seluruh kompetensi tersebut dapat diwujudkan.

Hasil penelitian menunjukkan kapasitas penyuluhan pertanian masih lemah bahkan karakteristik penyuluh pertanian tidak memberikan pengaruh nyata. Kompetensi andragogik belum terlalu baik dalam membuat dan menggunakan media, membuat dan menggunakan metode, serta mengevaluasi kegiatan. Kompetensi komunikasi yang dimiliki sudah baik, yang masih lemah hanya dalam tingkat kesesuaian informasi dan tingkat penguasaan informasi. Hal yang sama ditunjukkan oleh kompetensi mengembangkan kelompok, yang masih lemah hanya dalam mengevaluasi kelompok dan kemampuan pembentukan kelompok. Kompetensi sosial

yang dimiliki belum terlalu baik, yang masih lemah adalah dalam mengolah data pengembangan sistem kerja dan menganalisis jejaring kerja.

Kelemahan yang ada menyebabkan kelambatan penyuluh mengikuti perkembangan inovasi, senada dengan temuan Helmy *et al.* (2013), yang menunjukkan bahwa *cyber extension* berpengaruh nyata terhadap kompetensi penyuluh. Dalam hal ini, *cyber extension* merupakan salah satu mekanisme pengembangan jaringan komunikasi informasi inovasi pertanian yang terprogram secara efektif, dengan mengimplementasikan TIK dalam sistem penyuluhan pertanian. Sementara itu, Subejo (2011) menjelaskan bahwa *cyber extension* sebenarnya telah dimulai pada tahun 1988 di Jepang dan berkembang cukup pesat.

Faktor Eksternal Penyuluh Pertanian (ES)

Indikator formatif dari kapasitas penyuluh pertanian seluruhnya signifikan, yaitu: DIS dengan nilai uji-t adalah 4,99 memberikan pengaruh paling nyata, diikuti SOS dengan nilai 4,98; KPS dengan nilai 4,58; dan SRS dengan nilai 4,28. Dari hasil perhitungan dapat digambarkan *inner model* variabel eksternal S (ES) yaitu:

$$ES = 4,00 DIS + 4,58 KPS + 4,98 ORG + 4,28 SRS + \delta_5$$

Hasil analisis dari faktor eksternal semuanya menunjukkan pengaruh nyata, baik dari kebijakan PP, struktur organisasi, dukungan inovasi, dan sarana prasarana PP. Namun, dari penelusuran mendalam terhadap kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) dan informan kunci lainnya ternyata harapan dukungan yang seharusnya ada belum semuanya terealisasi. Dukungan dana yang sangat diperlukan belum tersedia dengan cukup, demikian juga inovasi yang tersedia masih sulit dijangkau, apalagi secara internal sifat proaktif dari penyuluh masih lemah. Demikian juga pembagian tugas antara struktural dan fungsional belum terlaksana dengan baik, sehingga kewenangan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) di kabupaten masih belum dilimpahkan dengan baik kepada BP3K di kecamatan.

Walaupun kelembagaan PP sudah cukup kuat dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun

2006, ternyata kondisi di lapangan menunjukkan bahwa wujud struktur organisasi baru berhasil dalam mengelola penyuluh, namun belum mampu mendorong penyuluhan yang partisipatif dalam memberdayakan kelompok tani. Menarik apa yang disampaikan Puspadi (2001) bahwa PP merupakan aktivitas kontekstual, baik penyelenggaraan, proses, materi maupun tujuan. Kejelian meramu unsur-unsur tersebut menjadi kunci keberhasilan penyuluhan yang partisipatif.

Berdasarkan analisis modifikasi model ternyata juga nilai R^2 untuk konstruk KPP sudah cukup tinggi sebesar 99,87%, yang memberikan arti bahwa variabilitas kapasitas penyuluh pertanian yang dapat dijelaskan oleh variabilitas internal dan eksternal PP sebesar 99,87. Faktor internal penyuluh pertanian sedikit lebih besar dibanding faktor eksternal dalam memengaruhi kapasitas penyuluh pertanian. *Inner model* KPP adalah

$$KPP = 18,47 IS + 13,40 ES + \zeta_1$$

Beberapa kelemahan yang masih menonjol adalah dalam penguasaan sumber informasi dan mengidentifikasi peluang diri, sehingga sulit diharapkan ada inisiatif sendiri dari penyuluh untuk mengembangkan kapasitasnya. Kelemahan tersebut memberikan pengaruh nyata dalam lemahnya penguasaan materi, media, dan pelaksanaan evaluasi penyuluhan. Senada dengan pendapat Niekerk *et al.* (2011) yang juga menjelaskan bahwa penyuluh masih lemah dalam penguasaan teknologi dan informasi dan kemampuan pemanfaatannya. Ketidaktahuan penyuluh dan pejabat struktural memaknai penyuluhan yang partisipatif terjadi karena sudah lama terbiasa dengan pendekatan *top down* serta kegiatan penyuluhan terbawa kepada pelaksana program. Menurut Indraningsih (2013), aspek ketenagaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan PP perlu menjadi fokus kegiatan PP yang berorientasi pada kebutuhan petani. Secara operasional, perlu dukungan kebijakan pemerintahan (pusat dan daerah) agar dapat terlaksana dengan baik, terutama terkait dengan anggaran. Menurut Mayrowani (2012), kinerja dan aktivitas PP yang menurun antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif terhadap arti penting dan peran PP, keterbatasan anggaran untuk PP dari pemerintah daerah, ketersediaan materi

informasi pertanian terbatas, penurunan kapasitas dan kemampuan manajerial dari penyuluh pertanian, serta penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani dan kelompoknya, di samping kunjungan lebih banyak dikaitkan dengan proyek.

Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kapasitas Kelompok Tani

Faktor Internal Kelompok Tani (IT)

Dari hasil perhitungan dapat digambarkan *outer model* variabel internal T (IT), yaitu:

$$KT = 0,510 IT + \delta_6$$

$$KKS = 0,827 IT + \delta_7$$

$$KMS = 0,874 IT + \delta_8$$

$$KSS = 0,747 IT + \delta_9$$

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa indikator reflektif dari internal poktan semuanya signifikan, di mana KK adalah indikator paling kuat dengan nilai *cross loading* 0,874; diikuti EK dengan nilai 0,827; SK dengan nilai 0,747; sedangkan indikator yang paling lemah adalah KT dengan nilai 0,510. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa petani sangat setuju dengan seluruh indikator yang ada. Dari faktor internal kelompok tani yang paling kuat mencirikan adalah kekompakan/kebersamaan, diikuti efektivitas kelompok, struktur kelompok, dan yang paling lemah adalah karakteristik pribadi petani.

Kekompakan/kebersamaan dicirikan oleh jalinan kerja yang tinggi menggambarkan kemampuan pengurus poktan menciptakan jalinan kerja dengan pihak luar kelompok dan kemampuan anggota menciptakan jalinan kerja dengan pihak luar kelompok. Jalinan kerja sama, juga sangat tinggi, menggambarkan kemampuan ketua/pengurus poktan membuat kerja sama dengan pemerintah, dengan petugas PP di lapangan. Hal ini diperkuat dengan pengambilan keputusan, di mana peran pengurus, anggota, dan petugas sudah baik. Apalagi ditunjang kemampuan dalam menyelesaikan konflik dan perencanaan kegiatan.

Efektivitas kelompok juga sangat baik, hal ini karena anggota merasakan peran aktif mereka, mulai dari menetapkan kebutuhan sampai pengembangan usaha. Dengan

demikian, keterlibatan anggota adalah gambaran tingginya partisipasi anggota dalam setiap kegiatan, sedangkan peran ketua dan pengurus serta penyuluh pertanian hanya sebagai fasilitator dan pembimbing terhadap kegiatan kelompok. Budhi *et al.* (2009) menyampaikan bahwa kurang berfungsinya kelembagaan pertanian yang ada antara lain disebabkan karena pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif, di mana petani sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) ditempatkan sebagai aktor yang menjalankan kelembagaan tersebut. Kelembagaan yang terbentuk tidak mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya. Dengan demikian, upaya untuk mengaktifkan kelembagaan petani harus dilakukan dengan menempatkan kembali petani pada posisi yang seharusnya, yaitu sebagai aktor dan desainer dalam pembentukan dan pengaktifan kelembagaan tersebut. Enam faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan lembaga, yaitu prinsip demokratis, partisipatif, difusi inovasi, pemberdayaan, dan keadaan konflik di masyarakat, juga perbedaan orientasi anggota masyarakat.

Struktur kelompok juga sudah baik, karena pembagian tugas dalam poktan tercipta atas dasar kesepakatan anggota. Hal ini menunjukkan bahwa ketua kelompok harus bisa menetapkan pembagian tugas pada anggotanya. Pembagian tugas dengan baik diperkuat dengan hierarki kepemimpinan yang ada. Namun, ternyata keterlibatan penyuluh dalam proses pembentukan poktan masih cukup kuat, walaupun penetapan tujuan lebih banyak ditentukan oleh pengurus. Karakteristik pribadi petani ternyata indikator paling rendah karena pengalaman berkelompok belum terlalu lama. Demikian juga tanggung jawab dalam berkelompok juga masih rendah, walaupun keaktifan sudah tinggi karena aktivitas kelompok masih dipengaruhi oleh aktivitas dari penyuluh dan petugas lainnya.

Karakteristik pribadi petani dan pengurus juga sudah baik, sehingga kapasitas poktan menjadi kuat. Hal ini sejalan dengan temuan Wasihun *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa partisipasi petani berkorelasi secara signifikan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kekayaan, di mana status pendidikan memberikan kontribusi yang terbesar.

Faktor Eksternal Kelompok Tani (ET)

Hasil penelitian juga menunjukkan indikator formatif dari kapasitas poktan, yaitu SP dengan nilai uji-t sebesar 4,17 memberikan pengaruh paling nyata; diikuti oleh SB dengan nilai 3,52; dan SPR dengan nilai 3,46. Faktor eksternal kapasitas poktan berpengaruh nyata terhadap kapasitas poktan karena nilai t-statistiknya adalah 9,46. Dari hasil perhitungan dapat digambarkan *inner model* variabel eksternal kelompok tani (ET), yaitu:

$$ET = 3,53 SB + 4,18 SP + 3,46 SPR + \delta_{10}$$

Sistem pembinaan dipengaruhi oleh dukungan dari Pemda terhadap kelompok berupa kebijakan untuk poktan, program untuk poktan, dan kebijakan untuk pengurus/anggota poktan, sedangkan dukungan lembaga nonpemerintahan terhadap poktan masih rendah. Dukungan lembaga nonpemerintah untuk keberlanjutan kelompok juga masih rendah, baik yang diberikan oleh lembaga swasta, oleh LSM, dan oleh lembaga perguruan tinggi. Pembinaan dari aparat pemerintahan juga sudah tinggi, yang dilakukan melalui pembinaan teknis produksi, pembinaan dari aparat desa, pembinaan oleh lembaga keuangan mikro, dan pembinaan yang diberikan oleh penyuluh. Sementara itu, dukungan dana yang dirasakan kelompok masih rendah.

Pengaruh budaya setempat juga tinggi, yang digambarkan oleh pengaruh budaya lokal dalam keberadaan kelompok, dan juga pengaruh pimpinan formal, pengaruh pimpinan formal dari pejabat pemerintah, pengaruh kepala desa dan pengaruh petugas lapangan terhadap perkembangan kelompok. Sebaliknya, pengaruh pimpinan informal tidak terlalu tinggi. Hal tersebut memberikan indikasi sudah terjadi pergeseran nilai di mana poktan sudah cenderung menjalin hubungan yang lebih formal dan sesuai kebutuhan. Dukungan masyarakat terhadap kelompok sudah tinggi, yang terlihat dari dukungan moral dari masyarakat terhadap keberlanjutan kelompok, dukungan materil, dan dukungan tenaga dari masyarakat. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa solidaritas dan kegotongroyongan masih menonjol dalam pengembangan kelompok.

Dalam homogenitas ternyata tidak terlalu tinggi, baik dalam kesamaan budaya kelompok, pengaruh tingkat perbedaan budaya, tingkat

kesamaan gender, tingkat perbedaan budaya terhadap kelompok, dan tingkat kesamaan bidang usaha (komoditas). Kondisi tersebut menggambarkan semakin rasionalnya anggota, di mana mereka tidak terlalu terpaku kepada latar belakang budaya dan usaha. Secara umum dapat dikatakan sosial budaya yang berkembang di lingkungan poktan memberikan pengaruh terhadap dinamika kelompok, tetapi anggota semakin rasional dan objektif dalam memaknai sosial budaya yang ada.

Ketersediaan sarana prasarana poktan ternyata dirasakan belum mencukupi, yang paling kurang adalah sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan. Demikian juga untuk kegiatan pengolahan hasil, untuk kegiatan sosial kelompok, dan untuk kegiatan pemasaran hasil. Tingkat kecukupan dana kelompok juga belum memadai, terutama untuk kegiatan operasional kelompok, untuk penyediaan alat dan bahan, dan untuk transportasi kelompok. Tingkat kesesuaian juga dirasakan belum mencukupi, yang berkaitan dengan kebutuhan petani, dengan jenis kegiatan, dengan tujuan kegiatan, dan dengan perkembangan kelompok. Dalam tingkat kemudahan aksesibilitas sarana prasarana juga tidak terlalu tinggi, biasanya disebabkan lokasi yang masih belum sepenuhnya lancar untuk transportasi.

Dengan demikian, dapat diduga bahwa sarana prasarana kelompok belum memadai baik dalam ketersediaan, kecukupan dana, maupun kesesuaian dan aksesibilitas kemudahan. Namun, keterbatasan tersebut bisa juga mendorong inisiatif anggota mencukupi sendiri untuk memajukan kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok adalah untuk kemajuan anggota, sehingga bantuan bukanlah segala-galanya, apalagi dengan makin terbatasnya bantuan pemerintah, baik dalam jumlah, frekuensi, maupun jenis.

Kapasitas kelompok tani sudah tinggi di mana pengaruh faktor internal sedikit lebih besar dibanding pengaruh faktor eksternal, sehingga memberikan pengaruh positif dan menjadikan aktivitas kelompok menjadi baik. *Inner model* KKT adalah

$$KKT = 12,43 IT + 9,46 ET + \zeta_2$$

Perkembangan kelompok tani secara umum di daerah penelitian belum terlalu baik. Kenyataan yang sama ditunjukkan oleh seluruh indikator formatif dari faktor eksternal kelompok tani yang sangat menentukan kapasitas

kelompok tani, juga memberikan prediksi bagi pengembangan kelompok tani. Pengembangan kelompok tani tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan di luar kelompok tani, seperti desa atau bahkan lembaga lokal tradisional lainnya. Dengan demikian, secara nyata kapasitas kelompok tani sangat kuat perannya dalam menjalin interaksi partisipatif. Menurut Budhi *et al.* (2009) ada enam faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan lembaga, yaitu prinsip demokratis, partisipatif, difusi inovasi, pemberdayaan, dan keadaan konflik di masyarakat, juga perbedaan orientasi anggota masyarakat. Interaksi partisipatif akan semakin baik pada saat struktur kelompok tertata baik dan dinamis. Proses identifikasi yang realistis akan mendorong terwujudnya perencanaan yang matang dan realistis. Bisa diduga kuatnya perencanaan akan membuat pelaksanaan dan evaluasi akan menjadi efektif, apalagi dari faktor eksternal kelompok juga didukung penuh oleh sistem pembinaan, sarana prasarana, dan sosial budaya yang kuat.

Pengaruh Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kapasitas Kelompok Tani terhadap Interaksi Partisipatif

Interaksi partisipatif dipengaruhi oleh kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani. Hasil pengolahan data menemukan bahwa kapasitas kelompok tani memberikan pengaruh lebih besar, bahkan seluruh indikator reflektif interaksi partisipatif yang berasal dari kapasitas penyuluh pertanian semuanya gugur. *Outer model* variabel interaksi partisipatif (IP) adalah

$$IP = 0,828 \text{ KT}(PI) + \delta_{11}$$

$$IP = 0,791 \text{ KT}(PM) + \delta_{12}$$

$$IP = 0,888 \text{ KT}(PS) + \delta_{13}$$

Pengaruh kapasitas penyuluh pertanian terhadap interaksi partisipatif

Hasil perhitungan juga menunjukkan pengaruh kapasitas penyuluh pertanian terhadap interaksi partisipatif tidak nyata karena nilai t-statistiknya adalah 0,19 (lebih kecil dibandingkan t-tabel pada $\alpha = 10\%$ [uji dua arah] yang bernilai 1,29). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas penyuluh pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap interaksi

partisipatif, di mana nilai t-statistik hanya 0,152 (lebih kecil dari t-tabel pada $\alpha = 10\%$ [uji dua arah], yaitu sebesar 1,29). Hal ini berarti bahwa kapasitas penyuluh pertanian belum mampu mendorong interaksi partisipatif sebagai usaha mewujudkan kemandirian petani. Kenyataan ini diperkuat oleh interaksi partisipatif tiga indikator yang memiliki nilai *loading* di bawah 0,5; yaitu proses interaksi penyuluh/PIS (0,127), proses motivasi penyuluh/PMS (0,065), dan proses strukturisasi penyuluh/PSS (0,018), artinya kapasitas penyuluh belum mampu menjawab kebutuhan petani sebagai masyarakat penerima manfaat (*beneficiaris*). Walaupun secara internal penyuluh pertanian sudah mempunyai kompetensi yang memadai, kuatnya pengaruh faktor eksternal menekan kekuatan internal yang mereka miliki. Faktor eksternal tersebut meliputi struktur organisasi, dukungan inovasi, kebijakan penyuluhan, dan sarana prasarana penyuluhan.

Kelemahan tersebut tercermin dari indikator interaksi partisipatif, di mana kemampuan penggunaan stok ilmu pengetahuan yang ada masih lemah. Kelemahan lain yang juga terjadi adalah dalam mengambil peran dan membuat kerangka, terutama dalam menyampaikan materi penyuluhan. Indraningsih (2013) menyatakan proses interaksi menjadi tidak efektif akibat gagal dalam merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi sasaran. Kelemahan tersebut membuat kerangka interaksi menjadi lemah dan peran sebagai fasilitator gagal untuk diterapkan. Penyuluhan sebagai proses demokrasi harus mampu mengembangkan suasana bebas untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dengan mengajak sasaran penyuluhan untuk berpikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-sama sehingga mampu menyelesaikan masalah dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka.

Menurut Mardikanto (2009), penyuluh harus memiliki kapasitas dalam memainkan peran/tugas secara profesional yang diakronimkan dengan *edufikasi*, yaitu edukasi, diseminasi informasi/inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya, Mangkuprawira (2010) menjelaskan bahwa penyuluh pertanian sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat karena mempunyai fungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Prinsip kerja

pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian melalui pendampingan adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan (6) pembelajaran bersinambung. Di samping itu, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Agar pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa dan pengembangan forum pendampingan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas penyuluh pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap interaksi partisipatif, di mana nilai t-statistik hanya 0,152 (lebih kecil dari t-tabel pada $\alpha=10\%$ [uji dua arah], yaitu sebesar 1,29). Hal ini berarti bahwa kapasitas penyuluh pertanian belum mampu mendorong interaksi partisipatif sebagai usaha mewujudkan kemandirian petani. Kenyataan ini diperkuat oleh interaksi partisipatif tiga indikator yang memiliki nilai *loading* di bawah 0,5; yaitu proses interaksi penyuluh/PIS (0,127), proses motivasi penyuluh/PMS (0,065), dan proses strukturisasi penyuluh/PSS (0,018), artinya kapasitas penyuluh belum mampu menjawab kebutuhan petani sebagai masyarakat penerima manfaat (*beneficiaris*). Walaupun secara internal penyuluh pertanian sudah mempunyai kompetensi yang memadai, kuatnya pengaruh faktor eksternal menekan kekuatan kompetensi yang mereka miliki. Faktor eksternal tersebut meliputi struktur organisasi, dukungan inovasi, kebijakan penyuluhan, dan sarana prasarana penyuluhan.

Kelemahan tersebut tercermin dari indikator interaksi partisipatif, di mana kemampuan penggunaan stok ilmu pengetahuan yang ada masih lemah. Kelemahan lain yang juga terjadi adalah dalam mengambil peran dan membuat kerangka, terutama dalam menyampaikan materi penyuluhan. Indraningsih (2013) menyatakan proses interaksi menjadi tidak efektif akibat gagal dalam merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi sasaran. Kelemahan tersebut membuat kerangka interaksi menjadi lemah dan peran sebagai fasilitator gagal untuk diterapkan. Penyuluhan sebagai proses

demokrasi harus mampu mengembangkan suasana bebas untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dengan mengajak sasaran penyuluhan untuk berpikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersama-sama sehingga mampu menyelesaikan masalah dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka.

Lebih lanjut Indraningsih *et al.* (2013) menyatakan kegiatan penyuluhan berbasis program pemerintah yang bersifat *top down* bukan kebutuhan petani. Demikian pula halnya dengan penelitian oleh Ghimerei (2014) di Nepal dan India yang menunjukkan bahwa mekanisme penyuluhannya bersifat *top down* dan kebanyakan petani merasa bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi serta penyuluh dipandang kurang berkomitmen terhadap profesi mereka. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Soebiyanto (1998) bahwa PP yang tidak dialogis (dipaksa, terpaksa, dan terbiasa) hanya akan menghasilkan manusia sebagai faktor produksi, tidak memiliki aspirasi dan wawasan ke depan, serta sifat ketergantungan.

Selanjutnya, Mangkuprawira (2010) menjelaskan bahwa penyuluh pertanian sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat karena mempunyai fungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Prinsip kerja pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian melalui pendampingan adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan (6) pembelajaran bersinambung. Di samping itu, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Agar pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa dan pengembangan forum pendampingan.

Hasil penelitian menunjukkan kapasitas penyuluhan pertanian masih lemah, bahkan karakteristik penyuluh pertanian tidak memberikan pengaruh. Kompetensi andragogik belum terlalu baik dalam membuat dan menggunakan media, membuat dan menggunakan metode, serta mengevaluasi kegiatan. Kompetensi komunikasi yang dimiliki sudah baik; yang masih lemah hanya dalam tingkat kesesuaian informasi dan tingkat

penguasaan informasi. Hal yang sama ditunjukkan oleh kompetensi mengembangkan kelompok; yang masih lemah hanya dalam mengevaluasi kelompok dan kemampuan pembentukan kelompok. Kompetensi sosial yang dimiliki belum terlalu baik; yang masih lemah adalah dalam mengolah data pengembangan sistem kerja dan menganalisis jejaring kerja. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa masih lemahnya kemampuan penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian karena kompetensi yang mereka miliki belum sepenuhnya dapat menyiapkan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan secara utuh.

Berdasar hasil analisis model PLS, menjadi jelas bahwa karakter kerja penyuluh pertanian di daerah penelitian masih relatif tergantung pada apa yang diprogramkan dari struktur organisasi atau birokrasinya. Walaupun dalam konteks kondisi internal individu penyuluh, tingkat kemampuannya dalam berkomunikasi dan bekerja bersama petani sudah cukup menentukan kapasitasnya, namun karena ketergantungan demikian kuat, maka kapasitas untuk berinteraksinya menjadi lebih lemah dibanding dengan kapasitas kelompok tani.

Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh kapasitas penyuluh pertanian terhadap interaksi partisipatif tidak nyata karena nilai t -statistiknya adalah 0,19 (lebih kecil dibandingkan t -tabel pada $\alpha = 10\%$ [uji dua arah] yang bernilai 1,29). Sebaliknya, pengaruh kapasitas kelompok tani berpengaruh nyata terhadap interaksi partisipatif karena nilai t -statistiknya adalah 8,104 (lebih besar dibandingkan t -tabel pada $\alpha = 10\%$ [uji dua arah] yang bernilai 1,29). Dengan meninjau ke belakang, dapat diduga sudah terjadi anomali dari fungsi penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha di lapangan karena kegiatan penyuluhan belum mampu menjalin interaksi partisipatif. Walaupun kapasitas yang dimiliki penyuluh sudah baik, hal ini akan kurang bermakna apabila tidak diaplikasikan dalam proses motivasi, proses interaksi, dan proses strukturisasi.

Menurut Syahyuti (2010), pemberdayaan petani dengan pendekatan pengorganisasian secara formal kurang berhasil karena negara menginginkan petani diorganisasikan secara formal, sementara pasar cenderung menekan

petani (secara individu dan kelompok) untuk berperilaku efisien dan menguntungkan. Petani tidak harus berperilaku secara kolektif dalam kelompok untuk kepentingan administratif untuk menjalankan program.

Kondisi faktor eksternal yang kondusif akan menyebabkan motivasi kelompok menjadi lebih kuat untuk berinteraksi. Temuan ini sejalan dengan Moununi *et al.* (2009) yang mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan petani yang efektif, sistem penyampaian penyuluhan, keberanian perangkat lokal serta berfungsinya kelompok tani akan mengarah pada timbulnya motivasi yang berkelanjutan. Selain itu, Budhi *et al.* (2009) juga menunjukkan bahwa agen dari luar (*external agents*) dapat mendorong munculnya inisiatif masyarakat sebagai motivasi yang kuat untuk kehidupan mereka yang lebih baik.

Proses interaksi kelompok tani sangat didukung oleh kuatnya kapasitas yang mereka miliki. Petani sebagai anggota kelompok sudah memiliki kemandirian dalam menentukan pengembangan usahanya karena didorong lahirnya kegiatan yang didasari kebutuhan dan masalah yang mereka alami. Pada saat anggota merasa terbantu tentunya proses interaksi berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat Chaidirsyah (2009), bahwa interaksi antara poktan dengan kelembagaan untuk mengembangkan kemampuan sasaran penyuluhan bukan hanya melalui peningkatan pendidikan saja tetapi dengan membangun interaksi inter- dan antarpetani, pengorganisasian, dan pengembangan keterbukaan petani terhadap inovasi. Kuatnya kapasitas kelompok di daerah penelitian juga membuktikan betapa besarnya pengaruh kelompok terhadap keberlangsungan interaksi partisipatif. Kelembagaan dan interaksi partisipatif memiliki hubungan yang sangat erat serta saling memengaruhi. Lebih lanjut, Nuryanti *et al.* (2011) menjelaskan bahwa saat ini ada indikasi bahwa poktan tidak semua berfungsi sebagaimana mestinya. Kinerja setiap poktan dalam menjalankan perannya dalam pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yaitu anggota kelompok.

Proses interaksi juga ditentukan oleh jarak sosial, yang sangat dipengaruhi oleh status dan peranan sosial. Artinya, semakin besar perbedaan status sosial dan peranan yang diambilnya, semakin besar pula jarak sosialnya dan sebaliknya apabila jarak sosial sempit dan peran yang diambil seimbang maka

interaksi akan semakin partisipatif. Apabila jarak sosial relatif besar, maka pola interaksi yang terjadi cenderung bersifat vertical. Sebaliknya, apabila jarak sosialnya kecil (tidak nampak), maka hubungan sosial akan berlangsung secara horizontal. Sementara itu, Washihun *et al.* (2014) menemukan bahwa status pendidikan dan tingkat kekayaan yang rendah mengakibatkan rendahnya partisipasi.

Walaupun hasil kajian Kementerian Pertanian (Kementan, 2009) menyimpulkan bahwa kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata, ternyata kondisi di daerah penelitian sangat berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan kapasitas kelompok tani sudah baik dan berpengaruh nyata terhadap terjalannya interaksi partisipatif. Bahkan, kekuatan yang begitu baik dari kelompok tani seakan menghilangkan kapasitas penyuluh pertanian. Hal ini dikarenakan kelompok tani merupakan suatu lembaga di mana fungsi kelembagaan menunjukkan keragaman dan bersifat spesifik lokasi tergantung pada kondisi sosial kelembagaan, ekologi, dan ketersediaan teknologi pendukung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syahyuti (2010) yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan petani dengan pendekatan pengorganisasian secara formal merupakan hal yang umum, namun kurang berhasil. Eksistensi organisasi milik petani bergantung terutama pada kondisi lingkungan di mana ia hidup. Seharusnya organisasi formal untuk petani hanyalah sebuah opsi, bukan keharusan karena petani harus dihargai sebagai individu yang rasional.

Kinerja proses interaksi partisipatif sangat terkait dengan konstruksi variabel kapasitas penyuluh pertanian dan juga kelompok tani binaannya. Namun, ternyata variabel konstruksi kapasitas kelompok tani (KKT) lebih berperan kuat dalam membentuk kinerja interaksi partisipatif dibandingkan dengan variabel konstruk kapasitas penyuluh pertanian. Bukti empirik yang ditemukan ini menunjukkan bahwa kelompok tani jauh lebih bermotivasi, lebih aktif berinteraksi, dan juga berinisiasi mengembangkan kelompok dibanding dengan penyuluh pertanian.

Kenyataan ini tentunya ada hubungannya dengan hasil pengujian hipotesis pertama, bahwa ternyata kapasitas penyuluh pertanian

lebih banyak ditentukan oleh birokrasi dan kecenderungan sebagai pelaksana program. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan Indraningsih (2013) bahwa rumusan strategi penyuluhan pertanian perlu didasarkan pada karakteristik dan perilaku komunikasi khalayak sasaran (petani), dukungan iklim usaha, dan dukungan kebijakan pemerintah (pusat dan daerah). Aspek ketenagaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan perlu menjadi fokus kegiatan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada kebutuhan petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Chaidirsyah (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi penyuluhan pertanian pada intinya adalah penyuluhan pertanian yang berpusat petani dan berorientasi pada kepentingan, kebutuhan, dan permasalahan petani (*farmer driven extension*). Dengan demikian, penyuluhan pada akhirnya diharapkan mampu membentuk rangkaian interaksi partisipatif yang permanen agar muncul saling ketergantungan antara penyuluh dengan sasarannya. Namun, analisis data belum mampu membuktikan kondisi tersebut.

Menurut Huanrong (2001), interaksi antarkelompok mempunyai beberapa konotasi yaitu: (a) hubungan interorganisasi pada dasarnya adalah hubungan kontrak sosial, baik formal maupun informal; (b) ketergantungan sejarah, hubungan interorganisasi diasosiasikan dengan interaksi yang sedang berlangsung dan yang akan datang; (c) struktur hubungan interorganisasi adalah serba beragam; (d) tidak hanya bentuk eksplisit (kontrak formal), tapi juga bentuk tahu sama tahu/*tacit* (*emosi*, budaya, persahabatan, genetik, geografis); dan (e) hubungan interorganisasi adalah proses yang terus menerus. Jelas pendapat tersebut mendukung prinsip penyuluhan, bahwa pada saat penyuluh mampu bekerja bersama sasaran akan memberikan perubahan yang nyata.

Bukti empirik yang ditemukan ini menunjukkan bahwa poktan jauh lebih bermotivasi, lebih aktif berinteraksi, dan juga berinisiasi mengembangkan kelompok dibanding dengan penyuluh pertanian. Kenyataan menunjukkan bahwa kapasitas penyuluh pertanian lebih banyak ditentukan oleh birokrasi dan kecenderungan sebagai pelaksana program. Dengan demikian, penyuluhan pada akhirnya diharapkan mampu membentuk rangkaian interaksi partisipatif yang permanen sehingga muncul saling ketergantungan antara penyuluh dengan

sasarannya. Namun, analisis data belum mampu membuktikan kondisi tersebut.

Hasil analisis data membuktikan bahwa kapasitas kelompok tani mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap interaksi partisipatif. Dengan demikian, ketika kapasitas poktan meningkat maka interaksi juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika kapasitas kelompok tani menurun maka interaksi juga akan menurun. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa kapasitas penyuluh pertanian berpengaruh positif tetapi tidak nyata terhadap interaksi partisipatif. Berdasarkan pada hasil analisis model di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas poktan memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding dengan kapasitas penyuluh pertanian dalam membangun interaksi partisipatif.

Hasil penelitian secara nyata menemukan masih lemahnya kapasitas penyuluh pertanian (KPP) yang diduga dipengaruhi oleh dominasi faktor eksternal. Kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu/orang, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan untuk mengatur masalah/ urusan mereka dengan sukses seperti laporan UNDP (2007, 2008, 2009). Kelemahan pengembangan kapasitas penyuluh pertanian secara teoritis akan sangat berpengaruh terhadap interaksi partisipatif, sehingga kemandirian akan semakin sulit diwujudkan. Seorang profesional berbeda dengan seorang teknisi, keduanya dapat saja tampil dengan unjuk kerja yang sama. Seorang teknisi menguasai prosedur kerja dan dapat memecahkan masalah teknis yang sama, tetapi seorang profesional dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut filosofis, pertimbangan rasional, sikap positif, dan tanggung jawab sosial dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Menurut Yunita (2012) aspek-aspek dalam lingkungan sosial yang paling berpotensi memengaruhi pengembangan kapasitas rumah tangga petani, yaitu sistem kelembagaan dan akses terhadap sarana produksi, sangat strategis ditingkatkan untuk mengembangkan kapasitas. Pengembangan kapasitas rumah tangga petani adalah sistem kelembagaan petani dan akses terhadap sarana produksi. Oleh karena itu, aspek-aspek sistem kelembagaan dan akses terhadap sarana produksi sangat strategis ditingkatkan untuk mengembangkan kapasitas. Pengembangan

kelembagaan bagi masyarakat petani adalah sesuatu yang penting dilaksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kapasitas penyuluh pertanian (KPP), kapasitas kelompok tani, dan interaksi partisipatif. Hubungan antara interaksi partisipatif dengan kapasitas kelompok tani lebih kuat dibanding hubungan interaksi partisipatif dengan kapasitas penyuluh pertanian. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa interaksi partisipatif lebih dominan dipengaruhi kapasitas kelompok tani (KKT).

Interaksi Partisipatif menuju Kemandirian Petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi partisipatif antara penyuluh pertanian dengan petani yang berada dalam wadah poktan belum berjalan dengan baik. Kondisi tersebut akibat masih rendahnya kapasitas penyuluh pertanian. Rendahnya kapasitas penyuluh pertanian ternyata lebih banyak disebabkan oleh kuatnya tekanan faktor eksternal, sehingga faktor internal yang dimiliki penyuluh pertanian tidak bisa mereka manfaatkan dengan baik.

Ketergantungan pelaksanaan PP kepada faktor eksternal, dan ketergantungan petani dan poktan kepada fasilitas yang ada, menunjukkan kemandirian belum sepenuhnya terwujud. Sejalan dengan pendapat Sumardjo (2010) dan Puspadi (2002) yang menyatakan interaksi yang tidak partisipatif menyebabkan petani jadi kehilangan prakarsa, inisiatif, bahkan kehilangan jati diri karena kurang menyentuh pada kapital manusia (*human capital*). Kalau hal tersebut tidak menjadi perhatian, maka bisa terjadi keadaan sebaliknya, di mana petani dan poktan menjadi tergantung kepada fasilitas. Dengan demikian, masih diperlukan pembenahan terutama dalam kapasitas penyuluh pertanian, sehingga kemandirian petani dapat diwujudkan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan umum dari penelitian ini adalah interaksi partisipatif antara

penyuluh dengan kelompok tani belum terlalu kuat. Interaksi partisipatif antara penyuluh dengan kelompok tani di lokasi penelitian lebih dipengaruhi oleh kapasitas kelompok tani jika dibandingkan dengan kapasitas penyuluh. Hal ini karena kapasitas penyuluh pertanian yang ada belum mampu menunjukkan hasil yang nyata, sedangkan kapasitas kelompok tani sudah terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap terwujudnya interaksi partisipatif. Pengaruh kapasitas kelompok tani lebih tinggi dibanding kapasitas penyuluh pertanian, di mana kegagalan membangun interaksi partisipatif ternyata memperlambat terwujudnya kemandirian petani.

Secara rinci kesimpulan penelitian ini adalah *pertama*, faktor internal yang dapat memperkuat kapasitas penyuluh pertanian antara lain adalah kompetensi andragogik, kompetensi komunikasi, kompetensi mengembangkan kelompok, dan kompetensi sosial, sedangkan faktor eksternal yang dapat memperkuat adalah sistem pembinaan, sosial budaya, dan sarana prasarana kelompok tani. *Kedua*, faktor internal yang dapat memperkuat kapasitas kelompok tani adalah struktur kelompok, kekompakan/kebersamaan, efektivitas kelompok, dan karakteristik individu petani, sedangkan faktor eksternal yang dapat memperkuat adalah sistem pembinaan, sosial budaya, dan sarana prasarana kelompok tani. *Ketiga*, interaksi partisipatif dicirikan oleh indikator yang seluruhnya berasal dari unsur kelompok tani, yaitu proses motivasi kelompok tani, proses interaksi kelompok tani, dan proses strukturisasi kelompok tani. Sebaliknya, unsur yang berasal dari penyuluh pertanian tidak mampu menjadi penciri. Dengan demikian, terbukti bahwa kapasitas penyuluh dan kapasitas kelompok tani memberikan pengaruh positif terhadap interaksi partisipatif untuk mendorong kemandirian petani. Namun, kapasitas kelompok tani memberikan pengaruh lebih kuat dibanding dengan kapasitas penyuluh pertanian.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kebijakan operasional yang dibutuhkan antara lain adalah:

Pertama, perhatian terhadap kelompok tani harus lebih intensif, agar pemberdayaan penyuluhan bisa mendorong kemandirian.

Pemberian fasilitas tidak selamanya memberikan pengaruh positif, apabila tidak diimbangi dengan pemberdayaan yang partisipatif, mendorong petani agar mampu mengembangkan potensi diri dan potensi kelompoknya.

Kedua, para pemangku kepentingan perlu meningkatkan pemahaman tentang filosofi dan prinsip penyuluhan yang terkandung pada UU-SP3K tahun 2006.

Ketiga, para penyuluh pertanian perlu meningkatkan motivasi dan kapasitas diri terutama kompetensi komunikasi dan kompetensi mengembangkan kelompok, sehingga menjadi lebih produktif dan kredibel.

Keempat, pembinaan terhadap penyuluh swadaya harus terus digiatkan karena ternyata kekuatan kelompok tani sangat kuat dalam proses interaksi partisipatif, dengan selalu membekali mereka dengan peningkatan kapasitas sebagai penyuluh swadaya, sebagai mitra penyuluh PNS yang ada di lapangan.

Kelima, para pemangku kepentingan perlu meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyuluh. Sarana prasarana yang dibutuhkan antara lain fasilitas untuk penyelenggaraan pelatihan di BP3K, perpustakaan, bahan informasi inovasi, dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan demplot.

Keenam, pihak yang berkepentingan perlu memacu peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui penyelenggaraan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, dan studi banding.

Ketujuh, bagi pihak penyelenggaraan pelatihan, perlu adanya suatu analisis kebutuhan pelatihan yang lahir berdasarkan kebutuhan, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan yang didasarkan pada *competency based training* (CBT).

Kedelapan, perlu adanya penelitian sejenis mengenai faktor-faktor lain yang belum diteliti pada penelitian ini, antara lain kelembagaan penyuluhan, pendanaan kegiatan penyuluhan, perencanaan kegiatan penyuluhan yang partisipatif, dan penyuluhan yang mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budhi, G.S. dan M. Aminah. 2009. Faktor-faktor dominan dalam pembentukan lembaga sosial. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 27(1):29-41.
- [CIDA] Canadia International Development Agency. 2001. A capacity development experience in the water sector in Indonesia. The North Sulawesi Water Resources International Project.
- Chaidirsyah, R.M. 2009. Kajian Penyelenggaraan Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dalam Proses Pemberdayaan Petani. Bandung: Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2006. Undang Undang RI Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Ghimerei, N., V. Koundiya, and M.H. Clause. 2014. Government run vs. university managed agricultural extension: a review of Nepal, India and the United States. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology* 3(5):461-472.
- Ghozali, I. 2011. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Semarang: Program S3 Ilmu Ekonomi Program Magister Manajemen, Universitas Diponegoro.
- Helmy, Z., Sumardjo, N. Purnaningsih, dan P. Tjiptoproto. 2013. Hubungan kompetensi penyuluh dengan karakteristik pribadi, persepsi penyuluh terhadap kelembagaan dan persepsi penyuluh terhadap sifat inovasi cyber extension. *Jurnal Agro Ekonomi*. 31(1):1-18.
- Hidayat, N. dan B.W. Otok. 2012. Pemodelan Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varians pada Derajat Kesehatan di Provinsi Jawa Timur 2010. Yogyakarta: Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Huanrong, L.I. 2001. Study on the inter-organizational relationship and its evolution. The Guangdong Natural Science Foundation (Grant NO. 04011765):111-115. Guangdong: School of Management, Guangdong University of Business Studies Guangzhou.
- Indraningsih, K.S. 2013a. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usahatani petani sebagai representasi strategi penyuluhan pertanian berkelanjutan di lahan marjinal. *Jurnal Agro Ekonomi* 31(1):71-95.
- Indraningsih, K.S. 2013b. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian dalam perspektif membangun industrialisasi pertanian pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 31(2):89-110.
- Kementerian Pertanian. 2009. Penguatan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Jakarta: Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
- Mangkuprawira, S. 2010. Strategi peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas sumber daya manusia pendamping pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 28(1):19-34.
- Mardikanto. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: UNS Press.
- Mayrowani, H. 2012. Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah: kebijakan dan implementasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 30(1):31-47.
- Moumouni, I.J., S.D. Vodouhe and F. Streiffeler. 2009. What makes small scale farmers participate in financial agricultural research and extension? Analysis of the three cases studies from Benin. *The Journal of Agricultural Education and Extension* 15(3):301-316.
- Niekerk, J.A.V., A. Stroebel, C.J.V. Rooyen, K.P. Whitfield, and F.J.C. Swanepoel. 2011. Towards redesigning the agricultural extension service in South Africa: views and proposal of extensionist in the Eastern Cape, South Africa. *Journal of Agricultural Extension* 39(2):1-16.
- Nuryanti, S. dan D.K.S. Swastika. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29(2):115-128.
- Padmanegara, S. 2004. Penyuluh pertanian alat petani untuk memperbaiki sendiri nasibnya. Pidato ilmiah pada penerimaan gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) dari Universitas Padjajaran. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Pambudy, R. 1999. Perilaku komunikasi, perilaku wirausaha peternak, dan penyuluhan dalam sistem agribisnis peternakan ayam. Bogor: Program Studi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Puspadi, K. 2002. Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Soebiyanto, F.X. 1998. Peranan Kelompok dalam Pengembangan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusahatani. Bogor: Program Studi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

- [STIK 11 April] Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 11 April. 2009. Interaksi sosial dalam hubungan antarmanusia. Sumedang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 11 April.
- Subejo. 2011. Babak baru penyuluhan pertanian dan pedesaan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. 7(1):61-70.
- Sumardjo. 1999. Transformasi model penyuluhan pertanian menuju pengembangan kemandirian petani (Kasus di Provinsi Jawa Barat). Bogor: Program Studi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. 2010. Penyuluhan menuju pengembangan kapital manusia dan kapital sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Orasi ilmiah guru besar dalam rangka Dies Natalis IPB ke-47, 18 September 2010, Bogor, Indonesia. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Syahyuti. 2010. Lembaga dan organisasi petani dalam pengaruh negara dan pasar. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 28(1):35-53.
- Turner, J.H. 1988. *A theory of social interaction*. California: Stanford University Press.
- [UNDP] United Nations Development Programme. 2007. Capacity assessment practice note. New York: The Capacity Development Group, United Nations Development Programme.
- [UNDP] United Nations Development Programme. 2008. Capacity assessment practice note. New York: The Capacity Development Group, United Nations Development Programme.
- [UNDP] United Nations Development Programme. 2009. Capacity development and UNDP. Fast facts of United Nations Development Programme. New York: The Capacity Development Group, United Nations Development Programme.
- Walgito, B. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wasihun, B.N, J.A. Kworleng, and E.L. Okorley. 2014. Farmers' perception of their level of participation in extension in Ethiopia: policy implications. *Journal of Agricultural Extension and Rural Development* 6:80-86.
- Yunita, G. Basita, Sugihen, P.S. Asngari, D. Susanto, dan S. Amanah. 2012. Strategi peningkatan kapasitas rumah tangga petani padi sawah lebak menuju ketahanan pangan rumah tangga (Kasus di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan). *Jurnal Penyuluhan* 8(1):42-53.